



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

kemitraan
partnership

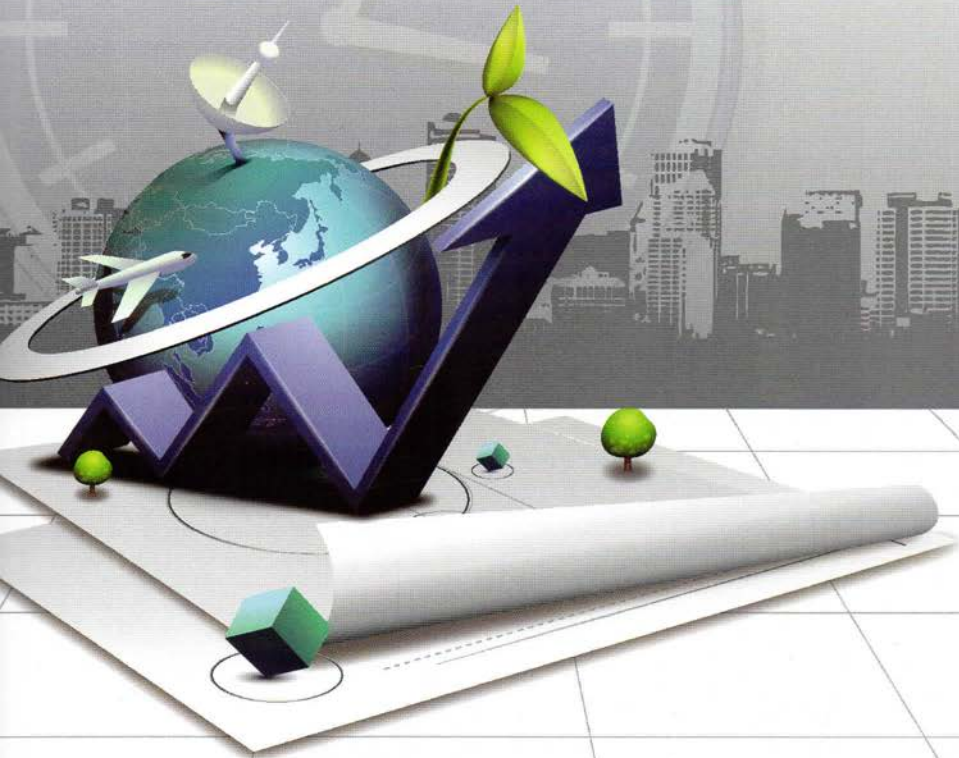
tiri MAKING
INTEGRITY
WORK



Unika
SOEGIJAPRANATA

INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK dan PENGEMBANGAN ETIKA BISNIS

Materi Pendidikan Integritas untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik



editor
Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum

**INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK
DAN PENGEMBANGAN ETIKA BISNIS**

**MATERI PENDIDIKAN INTEGRITAS
UNTUK KULIAH KERJA NYATA (KKN) TEMATIK**

Editor:

Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum



Buku Integritas dalam Pelayanan Publik dan Pengembangan Etika Bisnis ini dihasilkan dengan dukungan dana dari rakyat Amerika melalui United States Agency for International Development (USAID). Materi dalam publikasi ini adalah semata-mata tanggung jawab dari Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan tidak mencerminkan pandangan dari USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.

INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA BISNIS :
Materi Pendidikan Integritas Untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik

Diterbitkan oleh :

TIRI Integrity Action dan LPPM Universitas Katolik Soegijapranata
Sponsor oleh US Aid, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, TIRI, I-IEN

TIRI Integrity Action

Jl. Cipaku IV No. 3A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

LPPM Unika Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur IV No. 1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024 – 8441555 ext. 134

Penulis Buku : Tim
Editor : Marcella Elwina Simandjuntak
Desain Cover : Paulus Anggara Purnama Sidi
Lay-out : Triyono & M. Pramono

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KTD)

Simandjuntak, Marcella Elwina (Ed)
Integritas Pelayanan Publik dan Pengembangan Etika Bisnis : Materi
Pendidikan Integritas Untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik
Semarang, TIRI Integrity Action dan LPPM Unika Soegijapranata, 2012

ISBN : 978 – 602 – 8011 – 42 – 6

PENGANTAR

Ka. LPPM Unika SOEGIJAPRANATA

Sebuah perguruan Tinggi memiliki kebanggaan bila dapat ikut mengembangkan nilai-nilai positif di dalam masyarakat. Pada tahun 2012 ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata mendapatkan karunia karena telah mendapat kesempatan untuk bekerjasama dan mendapatkan donor/sponsor dari USAid, Kemitraan, TIRI dan I-IEN untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan tema Integritas Pelayanan Publik dan Pengembangan Etika Bisnis.

Sasaran KKN kali ini adalah masyarakat di beberapa desa di daerah lereng Merapi yang sedang berbenah memperbaiki kehidupan setelah diterjang lahar dan abu vulkanik pada tahun 2010. Tujuan KKN ini adalah mahasiswa bersama masyarakat setempat dapat mempelajari dan melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan mengembangkan etika bisnis (kewirausahaan) yang sesuai dengan aturan yang benar.

Setelah lebih dari dua minggu hidup bersama masyarakat, para mahasiswa mengalami proses belajar dan saling berbagi pengetahuan dengan masyarakat desa mengenai nilai-nilai integritas dalam kehidupan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Soegijapranata menyadari bahwa pelajaran nilai-nilai integritas dalam kehidupan bukan hanya didapat oleh mahasiswa tetapi juga para dosen pendamping maupun institusi kami.

Oleh karena itu pada kesempatan ini saya selaku Ka. LPPM UNIKA Soegijapranata hendak mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Donor yakni USAid, Kemitraan, TIRI dan I-IEN atas sponsor yang diberikan sehingga KKN ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat Desa Ngargomulyo, Desa wates dan Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang telah bersedia bekerjasama dengan LPPM

Unika Soegijapranata Semarang dengan menerima mahasiswa KKN untuk belajar di sana, karena apapun bentuknya KKN adalah bagian dari kegiatan belajar. Semoga kerjasama ini tidak berhenti sampai disini dan terus dapat berlanjut di kemudian hari.

Saya atas nama LPPM juga mengucapkan kepada tim dosen, karyawan, dan mahasiswa yang telah melaksanakan KKN ini dan para penyusun modul yang telah bekerja keras untuk terlaksananya program KKN tematik ini.

Semoga apa yang kita pelajari dari KKN Integritas ini baik dari modul maupun pengalaman di lapangan dapat berguna bagi masyarakat dan dapat pula diaplikasikan dalam kehidupan selanjutnya.

Semarang, 30 Juli 2012

Kepala LPPM
UNIKA Soegijapranata

Dr. Margaretha Sih Setija Utami, M.Kes

UCAPAN TERIMA KASIH

LPPM UNIKA Soegijapranata mengucapkan terimakasih atas terlaksananya KKN Tematik Integritas Pelayanan Publik dan Pengembangan Etika Bisnis kepada:

1. USAid
2. Kemitraan
3. TIRI Integrity Action
4. Indonesia Integrity Education Network (I-IEN)
5. Bupati Kab. Magelang
6. Ka. Kecamatan Dukun Kab. Magelang
7. Ka. Desa Ngargomulyo Kec. Dukun Kab. Magelang
8. Ka. Desa Wates Kec. Dukun Kab. Magelang
9. Ka. Desa Sumber Kec. Dukun Kab. Magelang
10. Masyarakat Desa Ngargomulyo, Desa Wates, Desa Sumber Kec. Dukun Kab. Magelang.

PENGANTAR EDITORIAL

Salah satu bentuk keikutsertaan Perguruan Tinggi untuk membantu menyebarkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik adalah dengan menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dalam penyelenggaraan KKN mahasiswa yang telah dibekali pengetahuan yang cukup memadai diharapkan dapat membantu proses pelayanan publik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten/kota. Selain membantu tugas pelayanan publik, salah satu hal penting yang dapat dibangun melalui kegiatan KKN adalah membangun etika bisnis di kalangan masyarakat.

Salah satu permasalahan atau isu yang berkembang dalam rangka mencegah perilaku korup dan tindak pidana korupsi adalah dengan meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Perbaikan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk memberi perlindungan bagi setiap warga masyarakat dari penyalahgunaan wewenang demi terwujudnya tanggung jawab negara serta pelayan publik yang bersih, transparan serta akuntabel.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik dirumuskan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah membentuk organisasi penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk semata-mata untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat baik orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang akan menerima manfaat pelayanan publik. Dengan demikian seyogyanya di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik tersedia berbagai informasi baik lisan, tulisan maupun gambar yang disajikan secara manual ataupun elektronik.

Selain ketersediaan informasi, perlu pula dikembangkan standar pelayanan publik yang baik yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Adapun asas yang harus dikembangkan dalam rangka pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik adalah asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, serta keterjangkauan.

KKN yang setiap semesternya dilaksanakan oleh UNIKA Soegijapranata dimaksudkan untuk mewujudkan salah satu tugas pokoknya yakni melaksanakan pengabdian masyarakat yang merupakan perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan melaksanakan kegiatan KKN, mahasiswa dapat turut andil dalam memecahkan permasalahan integritas dalam pelayanan publik dan pengembangan etika bisnis dengan menerapkan konsep serta teori yang telah dipelajari saat perkuliahan. Maka, secara khusus, melalui KKN Tematis Integritas, mahasiswa Unika Soegijapranata Semarang mewujudkan partisipasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelayan publik dalam rangka pengembangan nilai-nilai integritas dan etika bisnis.

Buku pembekalan KKN ini berisi materi yang dapat diberikan kepada mahasiswa sebagai bahan ketika mereka akan dilepas untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. Buku ini adalah sebuah 'upaya kecil' dari beberapa dosen Unika Soegijapranata yang ingin mewujudkan pemahaman ilmu yang dimiliki dengan menularkannya kepada mahasiswa dan kepada masyarakat melalui mahasiswa KKN. Untuk itulah tema buku serta tulisan-tulisan yang dibuat disesuaikan dengan berbagai isu yang sering ditemui saat mahasiswa melaksanakan KKN di desa.

Buku ini terdiri dari XI Bab yang masing-masing berisikan tema yang berbeda-beda. Dalam Bab I diuraikan bagaimana mahasiswa harus menyesuaikan diri pada saat mereka hidup bersama-sama dengan masyarakat desa saat mereka melaksanakan KKN. Bab II menguraikan isu bahwa KKN adalah kegiatan belajar, karena mahasiswa tidak hanya dapat belajar di kampus, namun mereka juga dapat belajar dari masyarakat. Bab III menguraikan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan peran mereka untuk mengarusutamakan nilai-nilai integritas sektor pelayanan publik saat mereka KKN. Dalam bab ini diuraikan bahan-bahan dan pengertian-pengertian tentang pelayanan publik. Selanjutnya dalam Bab IV diuraikan materi tentang hak dan kewajiban masyarakat akan pelayanan. Dalam Bab V diuraikan tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Masalah umum yang hampir selalu ditanyakan ketika

mahasiswa KKN di desa. Bab selanjutnya yakni Bab VI menguraikan tentang aspek hukum dokumen kependudukan. Umumnya masyarakat desa sudah cukup mengerti tentang pentingnya dokumen kependudukan. Namun seringkali masalah ini juga menjadi persoalan, terutama tentang proses dan biaya yang harus mereka keluarkan ketika hendak mengurus dokumen kependudukan. Dalam beberapa hal, masyarakat perlu diberitahu hak-haknya akan dokumen kependudukan yang 'gratis' atau tidak membayar untuk menghindari 'uang siluman' yang ditarik tanpa dasar hukum. Dalam Bab VII dipaparkan materi mengenai pendirian usaha untuk menghidupkan bidang kewirausahaan masyarakat desa. Bab VIII memaparkan mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan apabila timbul sengketa mengenai suatu masalah dalam masyarakat. Materi ini memberi pemahaman bahwa tidak semua masalah harus berakhir di pengadilan. Bab XI menguraikan cara-cara mudah untuk membuat public e-service dalam rangka menyediakan informasi bagi masyarakat. Dalam dua bab yang terakhir yakni Bab X dan Bab XI dipaparkan mengenai etika yang harus dimiliki ketika masyarakat akan memulai usaha.

Semua materi ini dapat diberikan sebagai materi pembekalan kepada mahasiswa yang akan KKN dalam rangka menyiapkan mereka saat mereka harus terjun ke masyarakat dan menemui permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam buku ini.

Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) serta Ka. Unit Pengabdian UNIKA Soegijapranata. Terimakasih pula untuk US Aid, Kemitraan, I-IEN dan TIRI yang telah memberikan sponsor bagi mahasiswa KKN dan sponsor bagi penulisan buku ini yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan kegiatan Kuliah kerja Nyata (KKN) Tematik dengan mengambil tema 'Integritas Pelayanan Publik dan Pengembangan Etika Bisnis'. KKN tematik ini telah selesai diselenggarakan di beberapa desa di kaki gunung Merapi, Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Akhir kata semoga usaha kecil ini untuk selanjutnya dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa dalam rangka menyebarkan isu integritas dalam pelayanan publik saat KKN di masa yang akan datang dan bagi masyarakat pada umumnya. Salam integritas.

Semarang, 30 Juli 2012

Editor

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ka. LPPM Unika SOEGIJAPRANATA	iii
Ucapan Terimakasih	v
Pengantar Editorial	vii
Daftar Isi	x
Hidup Bersama Masyarakat Desa (<i>Hudi Prawoto</i>)	1
KKN adalah Kegiatan Belajar (<i>St. Hardiyarso</i>)	6
Meningkatkan Peran Mahasiswa dalam Masyarakat, dalam Pengarusutamaan Nilai-Nilai Integritas Sektor Pelayanan Publik (<i>Marcella Elwina S</i>)	24
Hak dan Kewajiban Masyarakat akan Pelayanan (<i>L. Eddy Wiwoho</i>)	43
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (<i>Agnes Arie Mientarry C</i>)	52
Aspek Hukum Dokumen Kependudukan (<i>Valentinus Suroto</i>)	70
Pendirian Usaha (<i>Ign. Hartyo Purwanto</i>)	81
Alternatif Penyelesaian Sengketa (<i>B. Resti Nurhayati</i>)	94
Membangun Integritas melalui <i>Public E-Service</i> (<i>Ridwan Sanjaya</i>)	106
Berbisnis dengan Etika (<i>Vincent Didiek Wiet Aryanto</i>)	115
Berbisnis secara Etis (<i>Octavianus Digdo Hartomo</i>)	126

MEMBANGUN INTEGRITAS MELALUI *PUBLIC-SERVICE*

Oleh: Ridwan Sanjaya *

A. PENDAHULUAN

Informasi yang tidak lengkap atau tidak ditampilkan seluruhnya seringkali menjadi sebab dari penyalahgunaan wewenang para pengelolanya. Dengan tidak adanya informasi yang transparan, maka pengguna layanan akan sangat bergantung pada pengelola atau orang-orang yang karena profesinya mempunyai informasi tersebut.

Proses layanan publik yang sebenarnya menjadi tidak dimengerti oleh masyarakat. Waktu untuk memperoleh layanan yang sebenarnya tidak lama, menjadi panjang dan berlarut-larut. Hal inilah yang kemudian menciptakan peluang berbagai pungutan liar atau bahkan suap.

Peluang-peluang untuk mempercepat proses yang sebenarnya memang tidak lama, terbuka melalui oknum-oknum yang selama ini bermain dalam proses tersebut. Bahkan seringkali inisiatif dimulai dari masyarakat pengguna layanan, yang menyediakan anggaran untuk tambahan dana setiap kali menggunakan layanan pulik.

Untuk itu diperlukan solusi dalam menjembatani masyarakat pengguna layanan publik dengan informasi yang sebenar-benarnya. Internet sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan tersebut, terutama sejak masyarakat saat ini tidak lagi asing dengan internet dan akses internet semakin mudah melalui berbagai *gadget*.

Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan publik di suatu instansi dapat mengakses informasi yang tersedia di internet, mempersiapkan syarat-syarat yang harus dilengkapi, dan menyediakan dana untuk biaya yang dibutuhkan sesuai dengan informasi yang disediakan.

B. PENTINGNYA *E-PUBLIC SERVICE*

Di atas sudah dijelaskan bahwa internet dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan publik. Dengan menggunakan kecanggihan teknologi informasi, pekerjaan pemerintah sebagai pelayan publik dapat

* Dr. Ridwan Sanjaya, SE., S.Kom., MS.IEC adalah Dosen Fakultas Ilmu Komputer, Unika SOEGIJAPRANATA

dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien, menghemat biaya serta mereduksi dampak buruk yang timbul seperti korupsi dan suap.

Apabila *E-Public Service* bisa diwujudkan maka manfaat yang akan diperoleh oleh seluruh masyarakat antara lain:

1. Informasi dapat lebih transparan dan lebih mudah diakses oleh masyarakat
Masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mencari informasi yang benar dan tidak dibodohi oleh informasi yang salah dari oknum-oknum yang memanfaatkan kesulitan akses sumber informasi.
2. Menghindari kecurangan
Dengan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan transparan, masyarakat lebih memahami prosedur dan biaya-biaya yang sebenarnya dibutuhkan. Mereka dapat menjalani prosedur yang sebenarnya tanpa pungutan-pungutan yang seharusnya tidak ada.
3. Memangkas birokrasi sehingga menghindari suap dan gratifikasi
Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ekstra untuk kepentingan suap atau gratifikasi dalam memperoleh informasi yang sebenarnya. Segala proses yang berjalan dapat dilihat secara mandiri, tanpa ketergantungan pihak lain.

Berbagai contoh *E-Public Service* yang dapat dibangun dan dikembangkan dalam KKN ini antara lain:

1. Koleksi informasi publik mengenai prosedur pelayanan di kantor-kantor pemerintah,
2. Prosedur dan informasi proses lelang barang dan jasa di suatu instansi, atau
3. Informasi peluang hibah yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat dan pengumuman hasilnya.
Keseluruhan aktivitas tersebut ditujukan untuk menjaga integritas Pelayanan Publik.

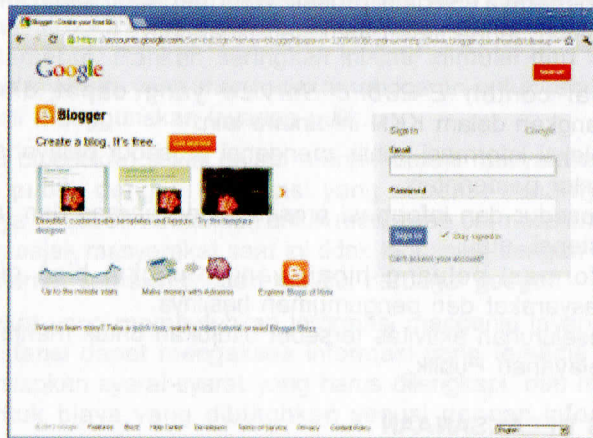
C. TEKNIS PELAKSANAAN

Agar bisa berhasil, layanan publik dalam bentuk informasi elektronik atau Public E-Service harus dikembangkan secara sistematis dan menyeluruh. Secara teratur dan terencana, semua informasi terkait layanan publik di daerah KKN dapat dipublikasikan melalui website yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Namun memang harus dipahami bahwa tidak semua masyarakat desa mengerti penggunaan komputer juga penggunaan internet. Namun tetap saja hal ini dapat diperkenalkan kepada aparat kecamatan dan desa.

Semua data yang diperoleh oleh peserta KKN akan disatukan menjadi kumpulan informasi berbagai layanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Karena meningkatnya akses internet melalui telepon seluler (ponsel), maka peserta KKN juga harus memastikan informasi tersebut dapat diakses melalui ponsel, bukan hanya komputer desktop atau laptop. Sehingga tujuan untuk berbagi informasi layanan publik ke masyarakat secara luas dapat tercapai secara maksimal.

Untuk mempermudah dan fokus pada konten layanan publik, peserta KKN dapat menggunakan layanan gratis yang ada di Internet. Saat ini cukup banyak website dengan platform blog yang mudah digunakan dan dikelola oleh pengguna awam sekalipun. Beberapa layanan tersebut antara lain Blogspot (blogger.com), Wordpress (wordpress.com), Multiply (multiply.com), Tumblr (tumblr.com), dan masih banyak lagi. Meskipun masing-masing layanan mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri, semuanya dapat dipelajari dalam waktu yang singkat.

Berikut akan disampaikan beberapa langkah mudah untuk membuat beberapa layanan dengan menggunakan internet yang bisa saja dilakukan di kecamatan atau desa tempat mahasiswa ber-KKN.



Gambar 1. Blogger, Layanan Blog dari Google

Sedangkan untuk penggunaan alamat, dapat menyesuaikan dengan nama lokasi yang terkait dengan informasi layanan publik. Pemilihan alamat yang tepat akan memudahkan masyarakat menemukan informasi yang ditulis melalui mesin pencari. Penentuan nama juga dapat dikonsultasikan dengan pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi KKN.

demak-layanan-publik.blogspot.com

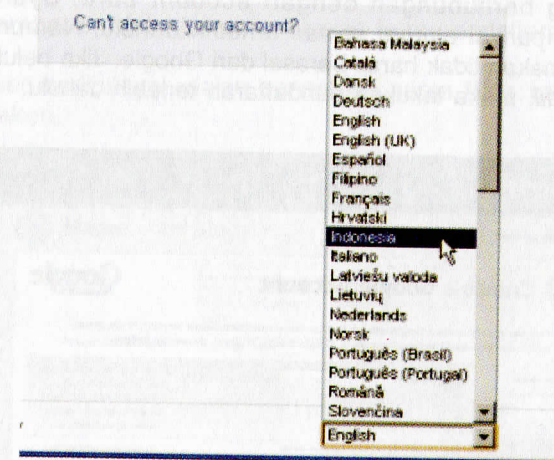
Gambar 2. Contoh pemberian alamat

D. PEMBUATAN BLOG

Pertama-tama yang perlu Dilakukan untuk mempunyai Blog di dalam Blogspot adalah mendaftar terlebih dahulu di <http://www.blogger.com>. Dengan hanya dalam tiga langkah seperti yang tertulis di halaman depan blogger.com, Anda dapat memiliki Blog sendiri sekaligus mengelolanya secara mandiri.

Langkah-langkah registrasi Blog di dalam blogger.com adalah sebagai berikut:

1. Buka browser web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya). Selanjutnya di dalam kotak alamat, ketikkan <http://www.blogger.com>. Gantilah opsi bahasa dengan pilihan bahasa Indonesia.



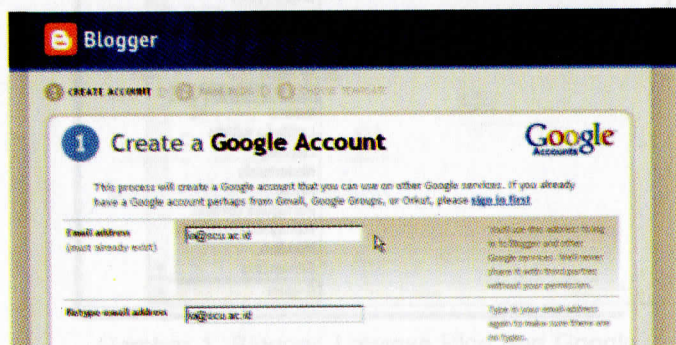
Gambar 3. Halaman depan situs blogger.com

2. Kemudian tekan tombol "Memulai" yang berwarna jingga. Tombol tersebut akan menghubungkan ke halaman pendaftaran.



Gambar 4. Menekan link Buat Blog

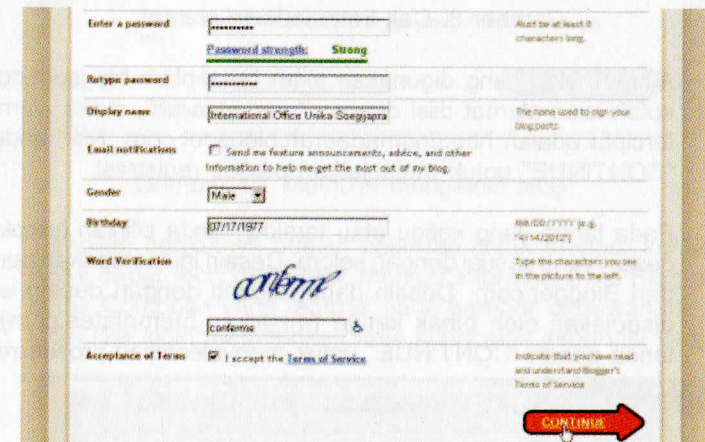
- Selanjutnya anda akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran yang berhubungan dengan *account* baru. Syaratnya, harus mempunyai alamat *e-mail* terlebih dahulu. Namun *e-mail* yang digunakan tidak harus berasal dari Google. Jika belum mempunyai *e-mail*, maka lakukan pendaftaran terlebih dahulu.



Gambar 5. *E-mail* merupakan keharusan

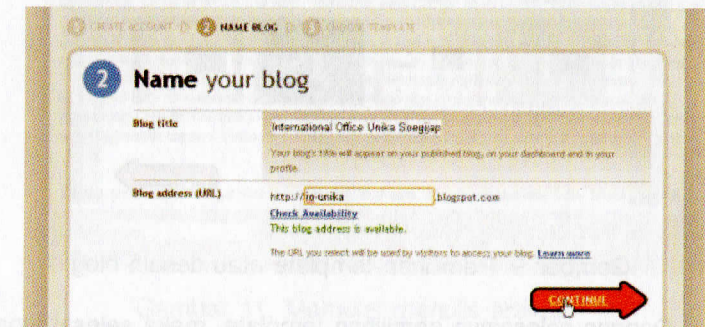
- Selanjutnya isilah kata sandi (password) sebanyak dua kali, nama yang ingin ditampilkan (Display name), jenis kelamin (Gender), tanggal lahir (Birthday) dengan format bulan/tanggal/tahun, dan teks yang tertulis di dalam gambar (Word Verification). Jangan lupa untuk

memberikan tanda cek pada kotak I accept the Term of Service untuk menyetujui kesepakatan penggunaan layanan. Setelah itu, tekan tanda panah CONTINUE untuk melanjutkan proses berikutnya.



Gambar 6. Melanjutkan pengisian form pendaftaran

- Proses berikutnya adalah penentuan nama Blog yang akan Anda gunakan.



Gambar 7. Penentuan nama dan alamat blog

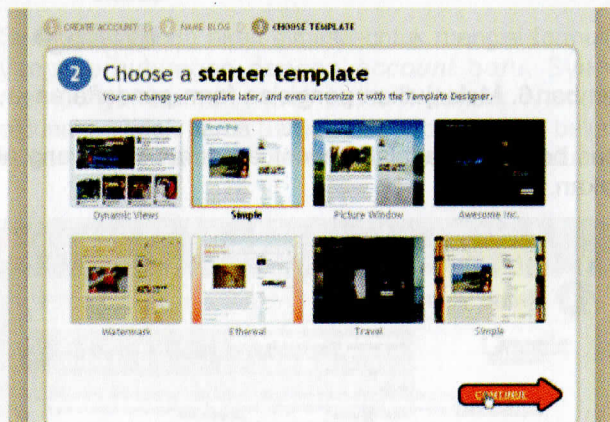
Untuk Judul Blog, dapat diisi secara bebas. Judul blog akan tampil pada header setiap halaman Blog. Namun untuk Alamat blog (URL), perlu diperiksa terlebih dahulu dengan memilih link "Check Availability" setelah menuliskan nama alamat yang akan digunakan.

Blog address (URL) .blogspot.com
[Check Availability](#)
This blog address is available.

Gambar 8. Cek ketersediaan alamat

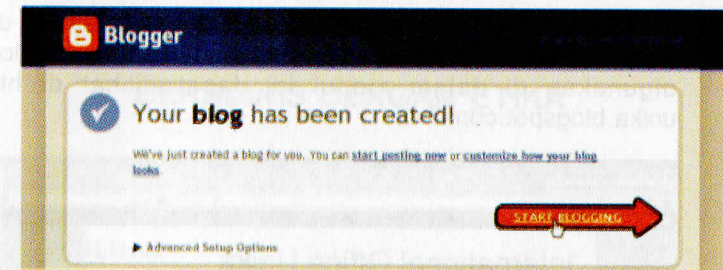
Alamat Blog yang digunakan akan berakhiran blogspot.com. Jika kotak isian alamat diisi dengan "namadaerah", maka alamat yang tercipta adalah <http://namadaerah.blogspot.com>. Klik tanda panah "CONTINUE" untuk melanjutkan proses registrasi.

6. Pada tahap yang ketiga atau terakhir, Anda pilihlah template atau desain yang sesuai dengan selera. Desain ini merupakan persediaan dari Blogger.com. Desain dapat diganti dengan desain lain yang disediakan oleh pihak ketiga (misalkan btemplates.com). Tekan tanda panah "CONTINUE" untuk menyelesaikan proses registrasi.



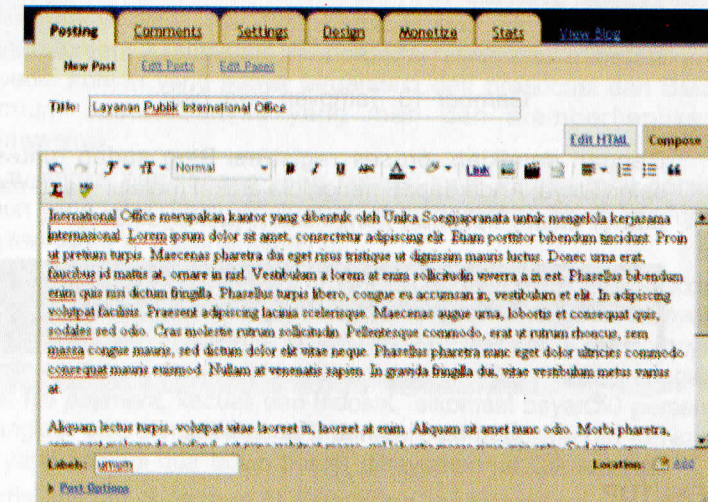
Gambar 9. Pemilihan template atau desain blog

7. Dengan selesainya pemilihan template, maka selesai juga proses registrasi. Setelah itu akan muncul informasi bahwa Blog telah tercipta. Anda sudah dapat memulai mengelola Blog, mulai dari menulis informasi, membuat informasi, sampai mengubah tampilan Blog, setelah link "START BLOGGING" ditekan.



Gambar 10. Memulai mengelola blog

8. Tampilan berikutnya adalah halaman untuk mengisi konten Blog. Anda dapat mencoba untuk mengisi informasi awal Blog di dalam kotak Compose yang tampak pada gambar di bawah ini. Berikan label jika ingin memberikan kata kunci atas informasi yang ditulis.



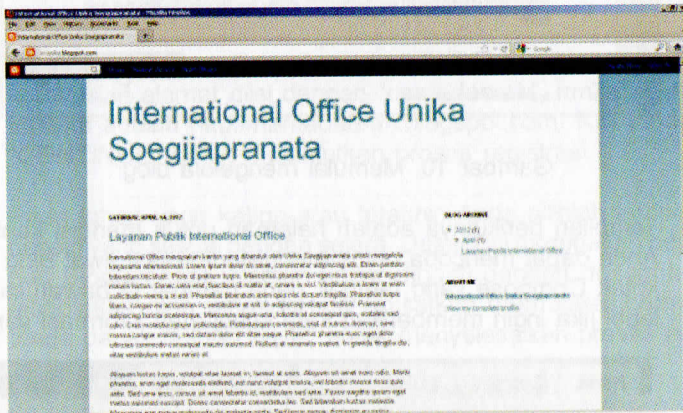
Gambar 11. Memulai menulis artikel

9. Tekanlah tombol Publish Post untuk menyimpan dan menampilkan artikel ke internet.



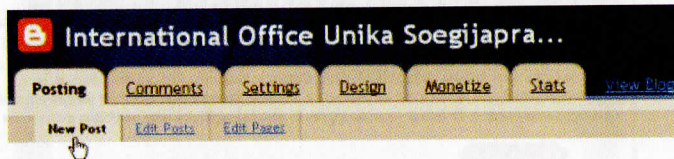
Gambar 12. Menekan tombol PUBLISH POST

10. Tampilan awal berupa nama Blog dan isinya akan tampak di dalam desain web yang telah dipilih sebelumnya. Contoh Blog yang digunakan di dalam modul ini dapat dilihat di <http://io-unika.blogspot.com>.



Gambar 13. Tampilan awal blog

Dengan demikian, proses registrasi Blog sudah tuntas. Untuk selanjutnya, Anda dapat mengelola artikel melalui menu-menu yang ada di dalam halaman pengelolaan (administrator).



Gambar 14. Menu pengelolaan

E. PENUTUP

Demikian tadi beberapa cara atau langkah mudah memberikan informasi pada masyarakat dengan menggunakan *e-public service*. Partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam membangun bank informasi layanan publik akan mendukung transparansi dan integritas layanan publik. Keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung informasi yang ditampilkan melalui website sangat disarankan agar dapat menciptakan kepedulian terhadap informasi yang tersedia untuk masyarakat.

BERBISNIS DENGAN ETIKA

Oleh : Vincent Didiek Wiet Aryanto *

A. PENDAHULUAN

Sebelum memasuki pembahasan dalam tulisan ini, berikut diberikan contoh studi kasus bisnis yang tidak beretika. Berikut contoh kasus yang diambil dari sumber: Sindonews, 3 Mei 2012.

Industri konten seluler terancam kolaps dan mati seiring dengan gulung tikarnya sejumlah perusahaan *content provider (CP)*. Ini dikarenakan ketentuan pemberhentian layanan melalui surat edaran (SE) BRTIN0 177/2011 dan dihentikannya pembayaran oleh operator telekomunikasi sejak Juli 2011. Ketua Umum Indonesian Mobile & Online Content Association (Imoca) Haryawirasma mengatakan, penyedia konten yang hanya tergantung dari broadcast dan SMS premium sudah banyak yang mati dan memberhentikan karyawannya.

"Kalau angka perusahaan yang kolaps, saya kurang tahu persis namun yang jelas, kalau tidak mati ya mengalihkan bisnis lain," ujar Haryawirasma di Jakarta kemarin.

Sementara, Ketua Umum Indonesian Mobile Multimedia Association (Imma) T Amersyah mengungkapkan CP yang gulung tikar banyak dan yang masih hidup pun terpaksa harus mengurangi karyawannya agar tetap bisa bernafas. "Karena enggak bisa promo dan enggak dapat *full payment*, kecuali dari Indosat. Telkomsel bayar 50 persen, sedangkan operator lainnya 100 persen belum dibayarkan bahkan ada yang sampai dua tahun belum dibayarkan ke CP," katanya.

Praktisi hukum Sulaiman N Sembiring mengungkapkan, kasus penyedotan pulsa sangat susah pembuktiannya apabila dimasukkan dalam kasus pidana. "Sesuai dengan UU Telekomunikasi No 6/1999 dan UU Perlindungan Konsumen No 8/1999, seharusnya penyelesaian kasusnya cukup berupa penghentian layanan dan penggantian kerugian pulsa pelanggan," ungkap dia.

* Prof. Vincent Didiek Wiet A., Ph.D adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unika SOEGIJAPRANATA



ISBN 978-602-8011-42-6